

Penerapan *E-Government* melalui Aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial

Implementation of E-Government Using Masagi Musrenbang Application in Ciburial Village

Dimas Dwi Prasetya¹ dan Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar²

^{1,2}Politeknik STIA LAN Bandung
Jalan Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Telp. dan Fax. 022-4237375

(Diterima 28/03/25; Direvisi 19/05/25; Disetujui 21/05/25)

Abstract

The Ciburial Village Government has developed an innovation in order to make changes to the process of compiling a list of community proposals in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang Desa) process, namely through the Masagi Musrenbang application. The Masagi Musrenbang application is a website-based application used to input, store, and inform a list of community proposals through the RW head based on the results of deliberations at the RW level for the purposes of compiling village planning. This study aims to determine the utilization, obstacles and efforts that can be made in the utilization of the Masagi Musrenbang application in Ciburial Village in terms of the success factors of e-Government implementation. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection in this study was carried out through interviews, observations, and documentation studies. The results of this study indicate that the use of the Masagi Musrenbang application in Ciburial Village shows a positive step in the effort to digitize village development planning in a participatory manner. This application has supported the process of inputting community proposals through the RW Head, although it still faces a number of obstacles such as limited human resource capacity, internet infrastructure constraints, differences in user devices, and budget limitations. There are several efforts to support the utilization of the Masagi Musrenbang application produced in this study, including: The Ciburial Village Government needs to immediately strengthen the institution by establishing a clear division of tasks related to the management of the Masagi Musrenbang application and allocating a special budget in the Village Budget for the development and maintenance of the application.

Keywords: village digitalization, village musrenbang, masagi musrenbang, e-Government.

Abstrak

Pemerintah Desa Ciburial mengembangkan suatu inovasi dalam rangka melakukan perubahan terhadap proses penyusunan daftar usulan masyarakat pada proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yaitu melalui aplikasi Masagi Musrenbang. Aplikasi ini berbasis *website* yang digunakan untuk menginput, menyimpan, dan menginformasikan daftar usulan masyarakat melalui ketua Rukun Warga (RW) berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW) untuk

² Email: rodliarta@gmail.com

keperluan penyusunan perencanaan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan, hambatan, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan pada penggunaan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial ditinjau dari faktor-faktor kesuksesan implementasi *e-Government*. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial menunjukkan langkah positif dalam upaya digitalisasi perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Aplikasi ini telah mendukung proses penginputan usulan masyarakat melalui Ketua Rukun Warga (RW), meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia, kendala infrastruktur internet, perbedaan perangkat pengguna, serta keterbatasan anggaran. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, yaitu Pemerintah Desa Ciburial perlu segera melakukan penguatan kelembagaan dengan menetapkan pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan aplikasi Masagi Musrenbang serta mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Kata Kunci: digitalisasi desa, musrenbang desa, masagi musrenbang, *e-Government*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk bertransformasi ke arah digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penerapan *e-Government* yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Di tingkat desa, implementasi *e-Government* menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan desa.

Desa digital didefinisikan sebagai sebuah konsep dimana sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Dengan diterapkannya desa digital akan berkontribusi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang bersifat digital (Dawud *et al.*, 2021). Program ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses, pelayanan publik dan juga mengembangkan potensi desa. Penerapan desa digital khususnya di Provinsi Jawa Barat telah diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dr. (H.C.) Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (periode tahun 2018 s.d. tahun 2023) sejak tahun 2019. Perkembangan jumlah serta persebaran wilayah Desa Digital di Jawa Barat hingga tahun 2021 adalah seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Desa Digital di Jawa Barat Tahun 2021

No.	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Satuan	Tahun
1.	32	Jawa Barat	3204	Kabupaten Bandung	3	Desa	2021
2.	32	Jawa Barat	3217	Kabupaten Bandung Barat	5	Desa	2021
3.	32	Jawa Barat	3216	Kabupaten Bekasi	3	Desa	2021
4.	32	Jawa Barat	3201	Kabupaten Bogor	0	Desa	2021
5.	32	Jawa Barat	3207	Kabupaten Ciamis	12	Desa	2021
6.	32	Jawa Barat	3203	Kabupaten Cianjur	17	Desa	2021
7.	32	Jawa Barat	3209	Kabupaten Cirebon	2	Desa	2021
8.	32	Jawa Barat	3205	Kabupaten Garut	2	Desa	2021
9.	32	Jawa Barat	3212	Kabupaten Indramayu	15	Desa	2021
10.	32	Jawa Barat	3215	Kabupaten Karawang	0	Desa	2021
11.	32	Jawa Barat	3208	Kabupaten Kuningan	8	Desa	2021
12.	32	Jawa Barat	3210	Kabupaten Majalengka	14	Desa	2021
13.	32	Jawa Barat	3218	Kabupaten Pangandaran	2	Desa	2021
14.	32	Jawa Barat	3214	Kabupaten Purwakarta	0	Desa	2021

No.	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Satuan	Tahun
15.	32	Jawa Barat	3213	Kabupaten Subang	2	Desa	2021
16.	32	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	15	Desa	2021
17.	32	Jawa Barat	3211	Kabupaten Sumedang	14	Desa	2021
18.	32	Jawa Barat	3206	Kabupaten Tasikmalaya	27	Desa	2021
19.	32	Jawa Barat	3273	Kota Bandung	0	Desa	2021
20.	32	Jawa Barat	3279	Kota Banjar	0	Desa	2021
21.	32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	0	Desa	2021
22.	32	Jawa Barat	3271	Kota Bogor	0	Desa	2021
23.	32	Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	0	Desa	2021
24.	32	Jawa Barat	3274	Kota Cirebon	0	Desa	2021
25.	32	Jawa Barat	3276	Kota Depok	0	Desa	2021
26.	32	Jawa Barat	3272	Kota Sukabumi	0	Desa	2021
27.	32	Jawa Barat	3278	Kota Tasikmalaya	0	Desa	2021

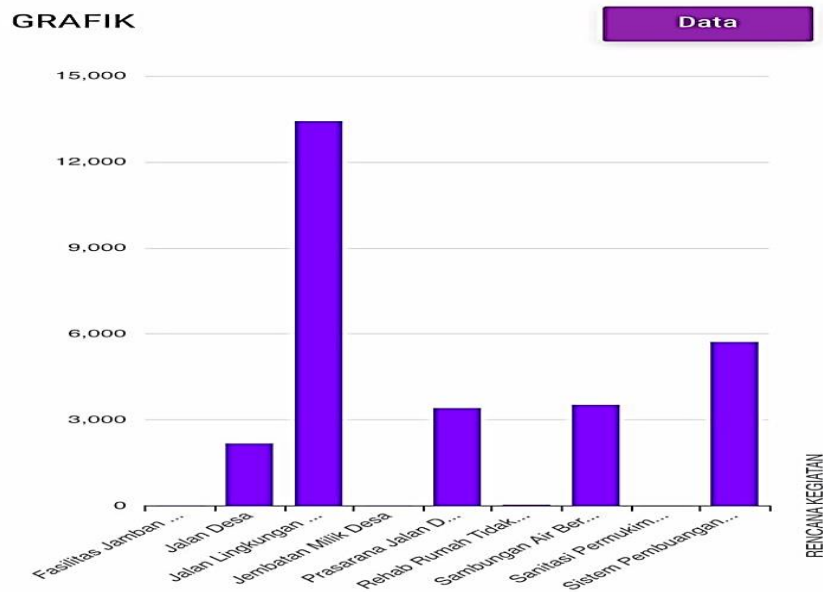
Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

Tabel 1 menunjukkan data desa digital di Provinsi Jawa Barat, dimana Kabupaten Bandung memiliki tiga desa digital, salah satunya adalah Desa Ciburial di Kecamatan Cimenyan. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung Barat) di utara, Kota Bandung di selatan dan barat (Kelurahan Dago), serta Desa Mekarsaluyu di timur. Jumlah penduduk Desa Ciburial mencapai 13.380 jiwa, terdiri dari 6.965 laki-laki dan 6.415 perempuan (Hernikawati, 2013).

Pemerintah Desa Ciburial telah meraih beberapa prestasi terkait penerapan desa digital, antara lain: Penghargaan Komunitas Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Terbaik se-Jawa Barat tahun 2016 dalam acara Kominfo Awards; Penghargaan Desa Pelopor Pengembangan Website Desa dalam Acara Festival TIK Kabupaten Bandung tahun 2017; Juara 1 Lomba Website Desa dalam Ajang Sabilulungan Festival TIK Kabupaten Bandung tahun 2018; Juara 1 Pengelolaan Media Sosial Desa dan Kelurahan dalam Acara Jabar Juara Award 2020; Juara 1 Lomba Desa dalam Acara Peringatan Hari Award Jadi ke-380 Kabupaten Bandung tahun 2021; dan Juara 1 Pengelolaan Media Sosial Kelurahan dan Desa Jawa Barat dalam Acara Humas Jabar tahun 2021 (Mukhsin, 2020).

Salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, solid, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih inovatif, Pemerintah Desa Ciburial menciptakan suatu program inovasi desa melalui gerakan Masagi (Maju Sabilulungan Giat) (Maryam, 2016). Gerakan Masagi merupakan slogan Pemerintah Desa Ciburial dalam melaksanakan program pembangunan desa untuk meningkatkan semangat kegotongroyongan masyarakat desa. Gerakan Masagi tertuang dalam Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Program Inovasi Desa Melalui Gerakan Maju Sabilulungan dan Giat. Bentuk program inovasi desa yang tertuang dalam peraturan desa tersebut antara lain Aplikasi JDIH Desa, Aplikasi Masagi Musrenbang, Aplikasi Masagi RKP Online, Aplikasi Masagi Bantuan Sosial, Website Desa & Media Sosial Desa, Masagi Bersih, Ciburial Festival, Masagi Sarjana Desa, dan Warung Masagi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Ciburial dalam menerapkan *e-Government* dalam hal pelayanan publik khususnya mengenai layanan aspirasi masyarakat di Desa Ciburial adalah menciptakan Aplikasi Masagi Musrenbang. Aplikasi ini berbasis *website* yang digunakan untuk menginput, menyimpan, dan menginformasikan daftar usulan masyarakat melalui ketua Rukun Warga (RW) berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Rukun Warga RW untuk keperluan penyusunan perencanaan desa (Mukhsin, 2020). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Usulan Masyarakat Desa Ciburial

Sumber: Aplikasi Masagi Musrenbang, 2022

Berdasarkan Gambar 1 tentang grafik daftar usulan masyarakat Desa Ciburial, terdapat 255 usulan masyarakat Desa Ciburial yang terbagi dalam 12 Rukun Warga (RW). Adapun usulan tersebut seperti fasilitas jamban umum atau MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum; jalan lingkungan permukiman (gang); jalan desa; prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, slab curvet, drainase, prasarana jalan lain); RTLH (Rumah Tidak Layak Huni); jembatan desa; sambungan air bersih yang mengalir ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain); sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain).

Berdasarkan pengamatan awal ditemukan bahwa masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa melalui aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Desa Ciburial. Namun, ditemukan hambatan dalam pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang, yaitu tersebut yang masih dalam tahap pengembangan, sehingga pemanfaatan aplikasi masih terbatas untuk digunakan di tingkat Rukun Warga (RW) dan lembaga pemerintahan desa (Tumilantouw, 2019). Selanjutnya, hambatan lain yang ditemukan yaitu belum terdapat pembagian kewenangan yang jelas terkait dengan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial, baik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Program Inovasi Desa Melalui Gerakan Maju Sabilulungan dan Giat. Kemudian, kondisi jaringan internet juga berpengaruh pada pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang, mengingat kondisi geografis di desa yang didominasi oleh dataran tinggi. Selanjutnya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengguna juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang (Praditya, 2014). Kemudian, adanya perbedaan spesifikasi *handphone*, sehingga terjadi perbedaan performa untuk masing-masing pengguna di wilayah tertentu. Hambatan terakhir ditemukan bahwa pengembangan dan pemanfaatan aplikasi bersifat sukarela (belum dibiayai oleh sumber dana/keuangan desa).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik "Penerapan *E-Government* melalui Aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial". Tujuan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang, hambatan, dan upaya yang perlu dikembangkan dalam rangka

mewujudkan digitalisasi desa melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. Sehingga memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian *e-Government* khususnya di tingkat desa, yang selama ini masih kurang diteliti dibandingkan tingkat kota atau nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait model implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui sistem digital berbasis Musrenbang.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Definisi E-Government

E-Government (electronic government) secara sederhana didefinisikan sebagai penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses dalam sistem pemerintahan. Dalam arti sempit, *e-Government* diartikan sebagai pelayanan kepada masyarakat, rekayasa ulang dengan teknologi atau pengadaan melalui jaringan internet (Gordon, 2002). Selain itu, *e-Government* juga digambarkan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sebagai salah satu pendorong reformasi dalam mewujudkan *good governance*. World Bank (2001) menjelaskan bahwa *e-Government* merupakan “*refers to the uses of information and communication technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government*” (Akadun, 2009).

Menurut Indrajit (2006), *e-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang memberikan kemungkinan untuk mentransformasi hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan *stakeholders* lain yang memiliki kepentingan. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi jaringan internet dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi kepada masyarakat. Selanjutnya, Indrajit mengemukakan bahwa terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap pengertian *e-Government*, antara lain:

1. Sebagai suatu interaksi atau mekanisme baru dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders*.
2. Di dalamnya melibatkan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan publik.

e-Government juga dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi berbasis *website* (jaringan), komunikasi internet, serta dalam beberapa kasus merupakan aplikasi yang saling terhubung, yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses terhadap layanan serta informasi pemerintahan. Hal ini mencakup interaksi dengan masyarakat, pelaku usaha, pencari kerja, baik instansional maupun negara (Mustopadidjaja, 2003). Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, *e-Government* merupakan bentuk pemanfaatan serta optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan, yang diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan efisiensi dalam proses tata kelola pemerintahan.
2. Menyediakan layanan publik yang lebih responsif, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.
3. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan mutu layanan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi publik.

Keputusan suatu negara untuk mengimplementasikan *e-government* didasarkan pada keyakinan bahwa integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan akan memberikan berbagai manfaat strategis, diantaranya:

1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat serta berbagai kelompok komunitas lainnya.
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menekan biaya yang timbul dari transaksi, komunikasi, dan interaksi dalam proses administrasi pemerintahan.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbasis pada komunitas informasi dengan kualitas yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2.2 Tipe Relasi E-Government

Terdapat beberapa tipe relasi dalam *e-Government*. Tipe-tipe relasi tersebut, yaitu:

1. *Government to Citizens* (Pemerintah ke Masyarakat)
Tipe relasi *government to citizens* ini merupakan tipe yang paling umum, yakni pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama dari *government to citizens* adalah menciptakan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan kanal akses yang variatif agar masyarakat dapat menjangkau layanan pemerintah dengan mudah dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
2. *Government to Bussines* (Pemerintah ke Pelaku Usaha)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan dengan lancar. Aktivitas bisnis seperti perusahaan khususnya swasta akan lebih membutuhkan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga harus berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis bukan hanya untuk mempermudah para praktisi bisnis dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, namun lebih jauh lagi relasi dan interaksi yang baik dan efektif antara keduanya akan menciptakan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak.
3. *Government to Government* (Pemerintah ke Pemerintah)
Di era modernisasi saat ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara untuk saling berkomunikasi secara lebih masif. Hal tersebut dilakukan tidak terkecuali bagi antarelemen pemerintahan. Kebutuhan untuk menjalin interaksi antarpemerintah tidak semata terbatas pada urusan diplomatik, melainkan juga mencakup upaya memperlancar kerja sama lintas negara serta kolaborasi antarentitas nasional (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik, mekanisme hubungan sosial, budaya dan lain-lain.
4. *Goverment to Employees* (Pemerintah ke Aparat/Pegawai)
E-government juga dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di berbagai lembaga pemerintahan. Tujuan suatu negara mengembangkan *e-Government* tidak hanya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh sehingga pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara tersebut

Berdasarkan penelitian terhadap pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang, aplikasi tersebut masuk kedalam tipe relasi *e-Government* yang berupa *Government to Citizen*. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Masagi Musrenbang melibatkan Pemerintah Desa Ciburial sebagai *government* yang mengelola pemanfaatan aplikasi ini dan masyarakat khususnya para pengguna yaitu para Ketua Rukun Warga (RW) sebagai *citizen*/ masyarakat penerima layanan yang terlibat dalam pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang (Indrajit, 2016).

2.3 Faktor Kunci Keberhasilan *E-Government*

Terdapat empat faktor kunci keberhasilan *e-Government* (Faizah & Sensuse, 2009), antara lain:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan aspek penting dan dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam praktik implementasi *e-Government*. Penilaian yang dilakukan pada faktor kebijakan ini dilakukan terhadap manajemen/proses kebijakan terkait dengan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang dibuktikan dengan bentuk seperti Surat Keputusan (SK), peraturan/regulasi, pedoman atau rencana strategis penerapan kebijakan TIK. Penilaian ini dengan kata lain merupakan dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum (Wibowo, 2018).

2. Kelembagaan

Faktor kelembagaan berkaitan dengan keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *e-Government*. Penilaian terhadap faktor kelembagaan dilakukan terhadap aspek keberadaan struktur organisasi yang efektif, adanya dokumen tentang rumusan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh organisasi atau unit kerja, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah dengan tingkat kompetensi yang sesuai, dan program pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK (Wijaya, 2013; Winastwan, 2020).

3. Kepemimpinan

Penerapan *e-Government* tidak lepas dari faktor kepemimpinan sebuah organisasi khususnya dalam organisasi pemerintah. Kepemimpinan dibutuhkan dalam proses pengembangan dan penerapan *e-Government* melalui segala langkah-langkah yang diperlukan. *E-Government* membutuhkan kepemimpinan yang kuat agar berhasil yakni seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan, kemampuan, kecerdasan dan kompetensi yang mumpuni, disertai dengan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai reformasi publik. Dengan adanya kepemimpinan yang kuat, dapat dipastikan terwujudnya komitmen dari sumber daya, peningkatan keahlian, serta kerja sama yang terjalin secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Kepemimpinan juga mampu menelaah dan mengartikulasikan aspek-aspek yang dapat mendorong inisiatif *e-Government* melalui langkah-langkah yang diperlukan (Wijaya, 2013).

Keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari beberapa indikator yang relevan, yaitu (Tjuju & Siswanto, 2009):

- a) Menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam memimpin perubahan organisasional guna menciptakan dampak yang signifikan.
- b) Memiliki keterbukaan terhadap ide-ide inovatif sebagai dasar dalam membangun komunikasi interpersonal yang konstruktif.
- c) Mampu mengembangkan potensi kekuatan organisasi tanpa mengabaikan identifikasi dan pengelolaan terhadap kelemahan yang ada.
- d) Memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan strategis.

- e) Bersikap proaktif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia.
- f) Berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas dan motivasi sumber daya manusia di lingkungan organisasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang telah memenuhi faktor kepemimpinan menurut hasil kajian Nurul Faizah dan Sensue dengan beberapa indikator keberhasilan pemimpin yang diungkapkan oleh Tjuju dan Siswanto dalam konteks upaya digitalisasi desa melalui pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang.

4. Aplikasi

Faktor aplikasi disini merujuk pada ketersediaan serta tingkat pemanfaatan perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan layanan *e-Government*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi terhadap faktor ini mencakup keberadaan dan penerapan berbagai aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi *e-Government* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi (Wibowo, 2018).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penyusunan hasil penelitian ini mengacu terhadap teori maupun referensi bahan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai macam informasi serta teori yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mencoba menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian disertai dengan uraian persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut.

Penelitian pertama berjudul “Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kelurahan Kota Medan” yang dilakukan oleh Elfa Safira (2020). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip *good governance* (*United Nation Development Programme*). Terdapat beberapa prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) yaitu: partisipatif, transparansi, akuntabel, serta efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini, yaitu dari prinsip partisipatif yang berpedoman terhadap hasil wawancara menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan sangat bagus, hal itu dibuktikan dengan terarahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang. Selanjutnya, terkait prinsip transparansi, hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah diterapkannya aspek transparansi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya informasi mengenai usulan-usulan masyarakat yang disetujui oleh pemerintah. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat dapat turut serta mengawal proses pembangunan di wilayahnya. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan *bottom-up* melalui e-Musrenbang di tingkat kelurahan masih terbatas pada pengumpulan usulan hasil rembuk warga, yang selanjutnya dibahas pada forum Musrenbang di tingkat kecamatan. Prinsip yang terakhir yaitu mengenai efektif dan efisiensi, sudah efektif dikarenakan penerapan aplikasi e-musrenbang telah sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah ditentukan (Safira, 2020).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada upaya digitalisasi desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Masagi Musrenbang. Selain itu, lokasi penelitian tersebut dilakukan di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini dilakukan di tingkat desa. Selanjutnya, penelitian tersebut menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance*

untuk menganalisis hasil penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan faktor kunci keberhasilan *e-Government*.

Penelitian kedua berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis *Website* E-Musrenbang (Studi Kasus di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya)” yang dilakukan oleh Chalvin Alif Baskoro (2020). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *The Ladder of Participation* atau Tangga Partisipasi (Sherry R. Arnstein). Dalam teori ini, partisipasi dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: non partisipasi, tokenisme, dan kekuasaan masyarakat. Tiga tingkatan tersebut lalu dirincikan lagi menjadi delapan anak tangga partisipasi. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan non partisipasi yang memiliki tangga manipulasi, terapi dan menyampaikan informasi. Pada tangga manipulasi menghasilkan indikator bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang proses musrenbang. Pada tangga terapi, sudah terdapat komunikasi namun masih sangat terbatas dan bersifat satu arah. Pada tangga menyampaikan informasi, pemberian informasi terkait musrenbang dilakukan hanya untuk memberikan legitimasi terhadap program yang sedang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat tingkatan tokenisme yang berisikan dua tangga yaitu konsultasi dan peredam kemarahan. Pada tangga konsultasi, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah dan mendapat respons baik oleh pemerintah. Lalu pada tangga peredam kemarahan, terdapat proses negosiasi program pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat dalam forum musrenbang. Terakhir, terdapat tingkatan kekuasaan masyarakat yang memiliki tiga tangga yaitu kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat. Pada tangga kemitraan, kedudukan masyarakat dan pemerintah sejajar dikarenakan keduanya memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam sebuah program. Pada tangga pendelegasian kekuasaan, pemerintah memberikan wewenangnya kepada masyarakat untuk mengurus secara mandiri kebutuhan dan kepentingannya. Lalu, pada tangga pengawasan masyarakat, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perumusan masalah, implementasi, kontrol dan evaluasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Baskoro, 2020).

Perbedaan antara penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-musrenbang, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada upaya digitalisasi desa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan Masagi Musrenbang. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan teori *The Ladder of Participation* (Tangga Partisipasi) untuk menganalisis hasil penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan faktor kunci keberhasilan *e-Government*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis ingin mengetahui dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Masagi Musrenbang, hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Masagi Musrenbang, dan upaya yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan Masagi Musrenbang di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Creswell, 2009). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada Kepala Desa Ciburial, Kepala Urusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Tim IT Pemerintah Desa Ciburial, dan pengguna aplikasi Masagi Musrenbang yaitu para Ketua Rukun Warga (RW). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip atau berkas di Pemerintah Desa Ciburial atau dari pihak lain yang bukan merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini, melainkan

sumber yang bersifat data tambahan. Data tambahan tersebut berasal dari dokumen tertulis melalui karya ilmiah, buku maupun catatan tertulis yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teknik yang disampaikan oleh *Miles & Huberman* yang membagi tahap-tahap kegiatan analisis data menjadi beberapa bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Sementara itu, untuk menguji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Proses tersebut dilakukan melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, serta catatan-catatan penulis selama di lapangan. Triangulasi metode/teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemanfaatan Aplikasi Masagi Musrenbang

Permasalahan mengenai pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial berkaitan dengan proses pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya suatu pemecahan masalah untuk memperbaiki pengelolaan aspirasi masyarakat Desa Ciburial melalui aplikasi Masagi Musrenbang. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk menginput, menyimpan, dan menginformasikan daftar usulan masyarakat melalui ketua Rukun Warga (RW) berdasarkan hasil musyawarah di tingkat RW untuk keperluan penyusunan perencanaan desa. Teknis pelaksanaan aplikasi Masagi Musrenbang yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada pengguna, dalam hal ini yaitu para Ketua Rukun Warga (RW) oleh pemerintah desa dan tim RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Desa.
2. Para Ketua Rukun Warga (RW) sebelum melakukan penginputan ke dalam Masagi Musrenbang melaksanakan musyawarah di masing-masing wilayahnya bersama dengan masyarakat setempat dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun yang akan datang, dengan mengamati program atau kegiatan yang telah direalisasikan di tahun yang sedang berjalan atau tahun sebelumnya.
3. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah (baik dalam lingkup Rukun Warga/RW atau dalam lingkup dusun yang dikenal dengan musyawarah dusun). Hasil musyawarah yang telah dituangkan dalam berita acara kemudian akan melalui proses penginputan daftar usulan berdasarkan skala prioritas ke dalam aplikasi Masagi Musrenbang.
4. Proses penginputan didampingi oleh tim RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Desa mengingat adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia di RT/RW dan kondisi jaringan internet yang kurang memungkinkan di masing-masing wilayah.
5. Hasil penginputan daftar usulan yang dimuat dalam aplikasi Masagi Musrenbang, kemudian dibawa dalam forum musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk ditentukan skala prioritas tingkat desa yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan mengamati kesesuaian parameter/kriteria kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Hasil penentuan skala prioritas menjadi pedoman Tim RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Desa untuk melakukan survei penetapan prioritas kegiatan dihitung dari rencana anggaran biaya yang mengacu pada *take off sheet* (Peraturan Menteri PUPR nomor

28 Tahun 2016) dan kemudian dilakukan penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan perkiraan anggaran pada tahun berikutnya.

7. Menghitung perkiraan swadaya, partisipasi, dan gotong royong yang mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan, namun apabila terdapat kegiatan/program yang berada di luar kewenangan desa, akan dilimpahkan ke tingkat kecamatan melalui musrenbang tingkat kecamatan.
8. Hasil penyusunan daftar usulan yang telah sesuai dengan parameter kewenangan pemerintah desa akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rancangan RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa pada musyawarah desa. Selain itu, peraturan desa tentang RKP Desa dapat menjadi acuan untuk menetapkan peraturan desa tentang APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa.

Aplikasi Masagi Musrenbang tertuang dalam Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Program Inovasi Desa Melalui Gerakan Maju Sabilulungan Giat (Masagi). Aplikasi Masagi Musrenbang ini termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa Ciburial yang bertujuan untuk:

1. Mempermudah pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan desa secara partisipatif.
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menatausahakan program kerja pemerintah desa.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk meninjau pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial dengan menggunakan faktor-faktor kunci keberhasilan *e-Government* menurut Faizah & Sensuse (2009), sebagai berikut:

4.1.1. Kebijakan

Faktor kebijakan terkait dengan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang telah didukung oleh suatu kebijakan berupa Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Program Inovasi Desa yang berfungsi sebagai dasar hukum yang jelas terkait pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang dalam program inovasi desa. Namun dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan, dapat diketahui bahwa belum terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab secara khusus terkait dengan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Sehingga diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara khusus terkait pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang ini mengingat aplikasi ini telah berjalan dan diperlukan pengembangan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan secara dinamis.

4.1.2. Kelembagaan

Terdapat kendala terkait faktor kelembagaan dalam keterkaitannya dengan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Kendalanya yaitu aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan dengan pembiayaan yang bersifat sukarela. Kendala tersebut ditemukan berdasarkan observasi terhadap RPJMDesa Ciburial Tahun 2020-2025. Dapat diketahui bahwa aplikasi Masagi Musrenbang belum dicantumkan ke dalam potensi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Reguler) berdasarkan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang/Kegiatan	Masalah	Potensi
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Reguler)	1) Penyelenggaraan musyawarah desa belum optimal, partisipasi masyarakat kurang. 2) Musyawarah pembahasan APB Desa belum dilaksanakan secara rutin dan sistematis karena minimnya pemahaman regulasi dan teknis pelaksanaan.	1) <i>Website</i> Desa bisa menyajikan informasi pelaksanaan musyawarah. 2) Media informasi milik desa/kabupaten dapat digunakan untuk menyosialisasikan regulasi dan pagu anggaran.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll)	1) Terjadi perbedaan pemahaman regulasi antara Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendes PDT No. 17 Tahun 2019. 2) Perbedaan ini menyebabkan ketidaksinkronan antara pemerintah desa dan tim penyusun perencanaan desa.	1) Forum perangkat desa tingkat kecamatan. 2) Forum koordinasi antara kecamatan dan perangkat desa lainnya untuk menyelaraskan pemahaman.
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1) Terbatasnya pengetahuan dalam penilaian aset desa.	1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa agar penilaian aset lebih terstruktur.

Sumber: Pemerintah Desa Ciburial, 2022.

Dapat diketahui bahwa aplikasi Masagi Musrenbang belum dijadikan sebagai suatu potensi dalam bidang/kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa yang terdapat pada dokumen RPJM Desa Ciburial Tahun 2020-2025 pada bagian penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa aplikasi Masagi Musrenbang masih dalam tahap pengembangan dengan opsi pengusulan kepada Diskominfo Kabupaten Bandung atau pengalokasian anggaran pengembangan aplikasi Masagi Musrenbang melalui sumber keuangan desa.

4.1.3. Kepemimpinan

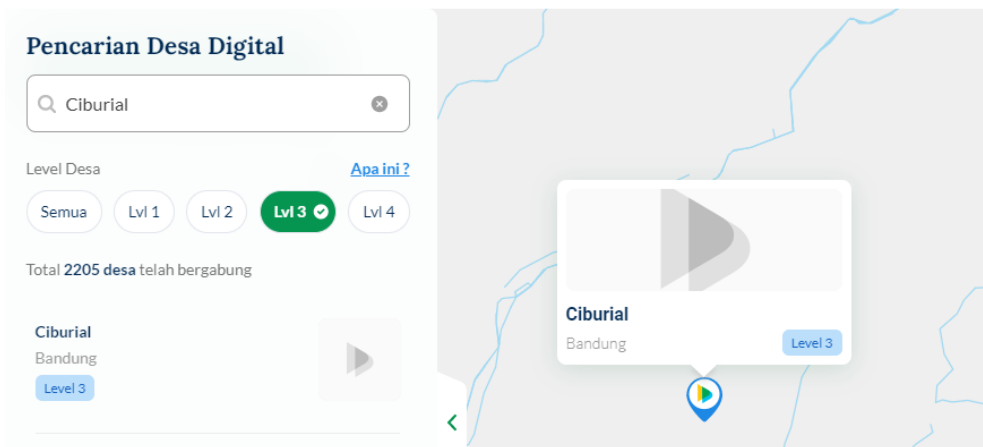
Berdasarkan observasi dari penulis, peran Kepala Desa Ciburial dalam faktor kepemimpinan dapat dilihat dari indikator keberhasilan pemimpin (Tjuju & Siswanto, 2009) mengenai relevansinya dengan upaya mewujudkan digitalisasi desa melalui aplikasi Masagi Musrenbang. Beberapa program inovatif yang lahir pada masa periode jabatannya, salah satu contohnya mengenai penetapan Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Program Inovasi Desa yang memuat mengenai aplikasi Masagi Musrenbang. Peraturan desa tersebut dapat menjawab mengenai indikator keberhasilan pemimpin dalam memiliki

akuntabilitas tinggi untuk memelopori perubahan organisasional sehingga bisa membuat perbedaan yang signifikan.

Kemudian, inovasi dalam implementasi program digitalisasi desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Ciburial melalui kepemimpinan Kepala Desa Ciburial saat ini, didukung juga dengan kemampuan perangkat desa dalam melakukan inovasi dan pengembangan program digitalisasi desa. Hal tersebut menjawab indikator keberhasilan pemimpin mengenai keterbukaan dalam menerima ide inovatif dan mengembangkannya dengan memotivasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Inovasi yang tertuang dalam Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2020 ditandai juga dengan kebebasan perangkat desa dalam melakukan modifikasi terhadap aplikasi Masagi Musrenbang.

Hasil observasi membuktikan mengenai indikator keberhasilan pemimpin dalam keterbukaan menerima ide kreatif untuk membangun komunikasi interpersonal yang positif antara pemimpin (Kepala Desa) dengan perangkat desa khususnya Kepala Urusan Perencanaan Evaluasi & Pelaporan dan Kepala Urusan keuangan. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Ciburial dengan membangun kultur organisasi dinamis dan inovatif kepada para perangkat desa di Desa Ciburial membuat para perangkat desa lebih leluasa mengekspresikan kemampuan dan ide kreatifnya yang dituangkan melalui pengembangan aplikasi Masagi Musrenbang.

Upaya lain yang dapat mendukung keberhasilan dalam faktor kepemimpinan oleh Kepala Desa Ciburial yaitu terdافتarnya Desa Ciburial pada program desa digital yang diinisiasi dari Gubernur Jawa Barat dengan tingkatan level desa berada pada level 3 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2: Desa Ciburial dalam Program Desa Digital Jawa Barat

Sumber: Website desadigital.jabarprov.go.id

4.1.4. Aplikasi

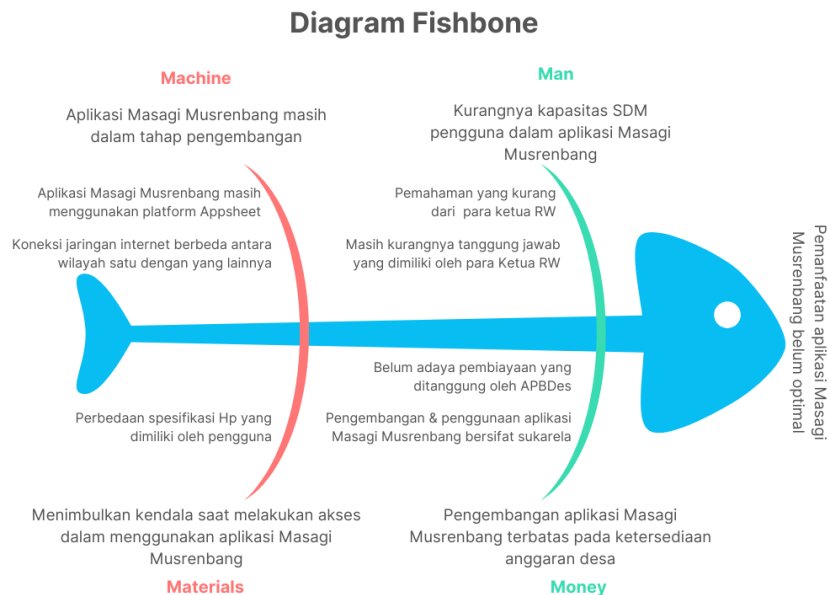
Faktor aplikasi merujuk pada ketersediaan perangkat lunak aplikasi serta bagaimana pemanfaatannya untuk mendukung layanan *e-Government* secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan mengenai faktor aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari aplikasi Masagi Musrenbang yang diperlukan dalam menjalankan fungsi *e-Government* di Pemerintah Desa Ciburial. Pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang sejauh ini memberikan *feedback* positif bagi masyarakat Desa Ciburial melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang Desa.

Proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang dalam pengembangannya berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang terjadi pada proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. Beberapa kendala yang ditemukan mengenai pemahaman pengguna (Para Ketua Rukun Warga) terhadap aplikasi Masagi Musrenbang. Hal ini ditemukan saat melakukan observasi dimana mayoritas Ketua Rukun Warga (RW) membutuhkan pendampingan teknis karena belum terbiasa menggunakan aplikasi digital berbasis web. Kendala lain yang ditemukan pada proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang yaitu mengenai ketersediaan jaringan internet yang belum merata. Kesenjangan jaringan internet antar wilayah di desa tersebut menghambat akses terhadap aplikasi.

Kendala lain yang ditemukan peneliti mengenai pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang yaitu aplikasi ini masih menginduk ke dalam platform Appsheet. Aplikasi ini menyediakan platform pengembangan tanpa kode, yang memungkinkan pengguna untuk merancang aplikasi berbasis seluler, tablet, dan web dengan memanfaatkan sumber data, seperti: Google Drive, Dropbox, Office 365, serta berbagai platform spreadsheet dan basis data berbasis cloud lainnya. Walaupun Appsheet merupakan peluang yang baik dalam pengembangan aplikasi bagi Pemerintah Desa Ciburial, namun Appsheet ini memiliki beberapa kekurangan dalam pemanfaatannya seperti tidak dapat digunakan untuk lebih dari 10 pengguna, rawan terhadap kebocoran data, dan tidak memiliki sistem keamanan aplikasi yang baik.

4.2 Analisis Hambatan Pemanfaatan Aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial

Diagram *fishbone* pada penelitian ini digunakan untuk membantu mengelompokkan dan memecah permasalahan atau hambatan yang ditemukan pada proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial.



Gambar 3: Diagram *Fishbone*
 Sumber: Website desadigital.jabarprov.go.id

Berdasarkan Gambar 3 Diagram *Fishbone*, hasil dari analisis kendala dalam pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial sebagai berikut:

4.2.1 Aspek *Man* (Pelaksana Kerja)

Aspek *Man* dalam penelitian ini merupakan sumber daya manusia pelaksana dalam proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. Hasil analisis pada aspek *man* menghasilkan permasalahan berupa kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengguna dalam aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pengguna (Para Ketua Rukun Warga) dalam proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan dominasi para ketua Rukun Warga (RW) yang sudah memasuki kategori lanjut usia, sehingga menimbulkan potensi pemahaman mengenai pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang yang basisnya digital kurang optimal.
- b. Kurangnya tanggung jawab yang dimiliki para pengguna pada proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan para Ketua Rukun Warga (RW) memiliki pekerjaan utama selain menjadi Ketua Rukun Warga (RW). Sehingga para Ketua Rukun Warga (RW) membutuhkan waktu lebih dalam peran dan tugasnya sebagai Ketua Rukun Warga (RW).
- c. Belum adanya struktur birokrasi yang menjadi pembagian tugas dan tanggung jawab mengenai proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Masagi Musrenbang ini masih dalam tahap pengembangan. Sehingga proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Ciburial belum terlaksana dengan baik.

4.2.2 *Machine* (Mesin, Peralatan, Infrastruktur)

Aspek *machine* yaitu suatu mesin, peralatan maupun infrastruktur yang mendukung serta untuk menjadi indikator keberhasilan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Hasil analisis pada aspek *machine* menghasilkan permasalahan berupa aplikasi Masagi Musrenbang masih dalam tahap pengembangan. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi jaringan internet di Desa Ciburial berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kendala tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Desa Ciburial yang didominasi oleh dataran tinggi yang mengakibatkan penyebaran jaringan internet belum merata ke seluruh wilayah Desa Ciburial. Hal tersebut memungkinkan adanya *error system* dalam proses penginputan daftar usulan masyarakat ke dalam aplikasi Masagi Musrenbang.

4.2.3 *Material* (Bahan Baku Utama maupun Bahan Baku Penolong)

Aspek *material* dalam penelitian ini merupakan suatu bahan baku utama maupun bahan baku pendukung (bahan produksi) yang dapat berupa media untuk menyampaikan data maupun informasi terkait pemanfaatan yang dilakukan melalui aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. Hasil analisis pada aspek *material* menimbulkan kendala saat melakukan akses dalam memanfaatkan aplikasi Masagi Musrenbang. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan spesifikasi *handphone* yang dimiliki oleh pengguna (para Ketua Rukun Warga) yang mengakibatkan perbedaan performa dalam proses pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang.

4.2.4 Money (Uang dan Finansial)

Aspek *money* berkaitan dengan keuangan dan finansial yang belum mendukung mengenai pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang. Hasil analisis pada aspek *money* yaitu permasalahan berupa pengembangan aplikasi Masagi Musrenbang terbatas pada ketersediaan anggaran desa. Hal tersebut diakibatkan oleh:

- a. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang masih bersifat sukarela. Hal tersebut memungkinkan sulit untuk menjalankan proses *maintenance* dalam pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang.
- b. Belum adanya pembiayaan yang ditanggung oleh APB Desa. Hal tersebut terjadi karena penggunaan APB Desa yang dimanfaatkan untuk program-program pemerintah desa Ciburial di dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial menunjukkan langkah positif dalam upaya digitalisasi perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Aplikasi ini telah mendukung proses penginputan usulan masyarakat melalui Ketua Rukun Warga (RW), meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan kapasitas SDM, kendala infrastruktur internet, perbedaan perangkat pengguna, serta keterbatasan anggaran. Meskipun sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Desa, pemanfaatannya belum optimal karena belum ada struktur birokrasi khusus dan aplikasi masih dalam tahap pengembangan serta belum masuk dalam dokumen perencanaan resmi desa (RPJMDesa).

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah Pemerintah Desa Ciburial perlu segera melakukan penguatan kelembagaan dengan menetapkan pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan aplikasi Masagi Musrenbang serta mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala kepada para Ketua Rukun Warga (RW) dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang merata sangat diperlukan agar implementasi aplikasi dapat berjalan maksimal dan merata di seluruh wilayah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta.
- Baskoro, C. A. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Creswell, J. , W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dawud, J., Ramdani, D. F., & Abubakar, R. R. T. (2021). The Urgency of the Public-Private Partnership Scheme in the Management of Electronic Parking in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 73–77.
- Faizah, N., & Sensuse. (2009). Faktor-Faktor Sukses Implementasi *E-Government* di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Digital Information & System Conference*. .
- Gordon F. Thomas. (2002). *E-Government – Introduction*, ERCIM News No.48
- Hernikawati, D. (2013). Pengelompokan Implementasi *E-Government* Tingkat Provinsi dengan Analisis Kluster. *Jurnal IPTEK-KOM*, 15(1), 63–74.

- Indrajit. (2016). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1).
- Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi*, 3(1).
- Mustafadidjaya, AR. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2), 129-140.
- Safira, E. (2020). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kelurahan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(3).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tjuju & Siswanto. (2009). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Tumilantouw, N. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 4(1).
- Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *Jurnal Spirit Publik*, 13(1), 79-85.
- Wijaya, E. dkk. (2013). Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Winastwan, R. E. (2020). Mekanisme Digitalisasi Terhadap Koleksi Langka di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 6(2), 59-64.

